

Kebijakan Shinzo Abe dalam Kebijakan Keamanan Jepang

Aditya Handi Pradipta, 20110510345.

Kebijakan Shinzo Abe dalam Strategi Keamanan Jepang

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional,

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta – 2019

Abstract

Japan is a nation that bound by chapter 9 of 1947's constitution, that makes Japan adopt the pacifism since Japan can't have their own military strength. Prime Minister Shinzo Abe aim to change this by revisioned the chapter 9. Using David Easton's System Theory and Global Power Shift concept by Joseph Nye Jr., writer aim to reveal the reason why Shinzo Abe want to change chapter 9. Writer shows the dynamic of Shinzo Abe's government and other outside factor like how China grow stronger and North Korea missile's threat, also how United State' influenced is declined.

Keyword(s): *Shinzo Abe, chapter 9, chapter 9 1947's constitution, System Theory, China, United States.*

Abstrak

Jepang merupakan Negara yang terikat oleh pasal 9 dari konstitusi 1947 yang membuat Jepang menganut paham pasifisme karena tidak diperbolehkan memiliki kekuatan militernya secara mandiri. Perdana Menteri Shinzo Abe berupaya untuk mengubah paham tersebut dan juga merevisi pasal konstitusi 1947. Menggunakan Teori Sistem dari David Easton dan Konsep *Global Shift Power* dari Joseph Nye Jr., penulis ingin mengungkapkan alasan keinginan Shinzo Abe untuk merevisi pasal 9. Penulis memperlihatkan dinamika pemerintahan di masa Shinzo Abe dan juga faktor – faktor eksternal seperti menguatnya China dan ancaman rudal dari Koorea Utara, serta turunnya supremasi Amerika Serikat.

Kata Kunci: Shinzo Abe, Pasal 9, Pasal 9 Konstitusi 1947, Teori Sistem, China, Amerika Serikat.

PENDAHULUAN

Jepang merupakan salah satu negara maju yang terletak di Asia Timur. Dapat dilihat dari kuatnya ekonomi Jepang dan kemampuan teknologinya yang maju. Dikelilingi oleh laut, pertumbuhan ekonomi Jepang didapat dari perdagangan maritim dan perkembangan sumber daya alam dari laut. Walaupun Jepang termasuk negara yang kalah dalam Perang Dunia II, Jepang mampu bangkit dan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia.

Setelah Perang Dunia II berakhir, Jepang diduduki oleh pasukan aliansi di bawah *the Supreme Commander for the Allied Powers* (SCAP) yang dipimpin oleh Douglas MacArthur. Lebih dari 430.000 pasukan ditempatkan di Jepang sejak tahun 1945 dan hampir seluruh kegiatan di Jepang saat itu dikendalikan oleh SCAP (Takahashi, 2000:137). Pada saat inilah sebuah konstitusi terbentuk dan mulai efektif diterapkan pada 3 Mei 1947. Berdasarkan Konstitusi 1947, khususnya pada pasal 9, kekuatan militer Jepang dibatasi akibat peran Jepang dalam Perang Dunia II.

Menurut isi dari pasal 9 tersebut, secara otomatis menghapuskan Jepang dari hak membangun kekuatan militer, bahkan untuk keamanan nasional Jepang sendiri. Namun pada tanggal 8 Juli 1950,

MacArthur memerintahkan pemerintah Jepang untuk membentuk *National Police Force* sebagai pasukan keamanan nasional Jepang. *National Police Force* berubah menjadi *Self-Defense Force* (SDF) pada tahun 1954 sebagai pasukan militer untuk menjaga keamanan nasional (Takahashi dan Jain, 2000:139). Dengan keterbatasan tersebut, Jepang menerapkan strategi politik yang disebut *Yoshida Doctrine*, diambil dari nama Perdana Menteri Yoshida Shigeru (1946-1947 dan 1948-1954). Inti dari doktrin tersebut ialah Jepang memprioritaskan rehabilitasi dalam bidang ekonomi dengan bergantung pada perlindungan Amerika Serikat. Dengan adanya perlindungan dari Amerika Serikat, Jepang diuntungkan karena setelah diberlakukannya konstitusi 1947, pertahanan dan keamanan Jepang menjadi tanggung jawab Amerika Serikat, dengan pengecualian ancaman yang datang dari dalam negeri menjadi tugas SDF nantinya. Dengan memanfaatkan payung militer dari Amerika Serikat, Jepang meminimalisir pengeluaran untuk kebutuhan militernya dan fokus untuk merehabilitasi masalah ekonomi dan sosial di Jepang serta memperkuat hubungan Jepang dan Amerika Serikat pada saat itu.

Shinzo Abe, Perdana Menteri Jepang ke 57, pertama menjabat di tahun 2006-2007, dikenal sebagai sosok nasionalis yang keras dan berkeinginan untuk mengembalikan *hard power* di Jepang. Di masa jabatannya yang kedua ini, 2012-2015, Shinzo Abe melakukan perubahan dalam hal keamanan Jepang. Beliau mencetuskan *National Security Strategy* (NSS) sebagai sebuah pedoman untuk kebijakan yang berkaitan dengan keamanan nasional. Keputusan Shinzo Abe untuk mengubah interpretasi pasal 9 menuai kritikan, bahkan dari masyarakat Jepang sendiri. Kebanyakan dari masyarakat Jepang merasa Jepang tidak perlu untuk lebih aktif dalam hal militer dan perlu dibatasi mengingat sejarah yang menimpa Jepang dahulu. Hal ini dikarenakan adanya sikap anti-militer pada masyarakat Jepang. Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II memberi dampak terhadap cara pandang masyarakat Jepang terhadap perang, tentara bersenjata dan keterlibatan militer dalam politik. Cina dan Korea Selatan melihat keputusan tersebut sebagai sebuah tanda kebangkitan militer Jepang seperti saat Perang Dunia II sehingga kedua negara tersebut tidak menerima dengan baik keputusan tersebut.

Jepang selama ini berpedoman pada pasal 9 dari Konstitusi 1947 untuk membuat kebijakan mengenai keamanan dan militer Jepang. Interpretasi baru dari pasal 9 yang dilakukan oleh Shinzo Abe akan menciptakan warna baru bagi kebijakan keamanan dan militer Jepang di masa depan. Keputusan tersebut merupakan hal bersejarah bagi Jepang karena keputusan Shinzo Abe untuk mengubah interpretasi pasal 9 merupakan yang pertama semenjak dibentuknya konstitusi tersebut.

KERANGKA PEMIKIRAN

Selama kurang lebih setengah abad setelah Perang Dunia ke-2, posisi militer Jepang dalam politik internasional berada dalam status quo. Jepang sebagai negara yang kalah diwajibkan untuk menghilangkan segala bentuk kekuatan militernya agar tidak menjadi potensi ancaman keamanan internasional. Sebagai gantinya, Jepang berada di bawah perlindungan Amerika Serikat untuk menjamin keamanan Jepang apabila terjadi serangan dari luar, seperti tertuang dalam *Treaty of Mutual Cooperation and Security* pada tahun 1960.

Perjanjian ini sifatnya tidak berimbang sebab Jepang berada di pihak yang lebih pasif, di mana seandainya Amerika Serikat diserang oleh kekuatan lain, Jepang tidak diwajibkan untuk memberikan dukungan. Namun kebijakan ini berubah pada Perang Teluk tahun 1990-1991, di mana Amerika Serikat mendorong Jepang untuk berkontribusi dan memberikan bantuan. Selain itu, berakhirnya Perang Dingin ternyata tidak berarti mengakhiri ketegangan di kawasan Asia Timur.

Dengan demikian Jepang menyadari bahwa kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat bukan jaminan atas keamanan kedaulatan. Amerika Serikat mengalami tekanan tersendiri dalam menjamin keamanan negaranya, misalnya pada serangan 11 September 2001 yang merupakan pemicu perang terhadap terorisme. Selain itu, tren pergeseran kekuatan global ke Asia semakin menggerus status Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya dunia. Kebangkitan Cina dan proliferasi nuklir Korea Utara menjadi pertimbangan utama untuk meningkatkan *bargain power* Jepang di kawasan Asia Timur. Itulah sebabnya Jepang membutuhkan sebuah perubahan untuk memastikan bahwa kedaulatan negara mereka tetap terjamin.

Untuk menjabarkan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sistem politik Jepang, penulis menggunakan Teori Suster oleh David Easton dan konsep **Pergeseran Kekuatan Global** oleh Joseph Nye. Nye berpendapat ada dua pergeseran kekuatan yang terjadi di abad-21 yaitu pergeseran di antara negara-negara yaitu dari Barat ke Timur yang disebut sebagai transisi kekuatan, dan pergeseran dari aktor-aktor pemerintahan menjadi aktor-aktor non-pemerintahan di belahan dunia manapun yang disebut sebagai difusi kekuatan. Transisi kekuatan tersebut, menurut Nye, tidak tepat disebut kebangkitan Asia, tapi lebih tepatnya pemulihan Asia berdasarkan data bahwa pada tahun 1750, populasi Asia lebih dari setengah penduduk dunia dan hal itu pun mewakili lebih setengah dari produksi dunia. Pada tahun 1900-an, produksi di Asia menurun sehingga hanya menyisakan 20% dari produksi dunia. Apa yang terjadi pada abad-21 adalah pemulihan Asia pada proporsi yang normal, dimulai oleh Jepang sejak Revolusi Meiji. Jepang mengalami peningkatan produksi nasional pasca Perang Dunia II karena pembekuan militer membuat alokasi keuangan Jepang terkonsentrasi pada pembangunan di sektor ekonomi. Pada saat ini, kekuatan ekonomi Asia terfokus pada Cina, yang membuat persaingan di kawasan Asia Timur sekitarnya semakin sengit.

Berlandaskan **Teori Sistem** milik David Easton, penulis memetakan unit-unit yang mempengaruhi perubahan kebijakan Jepang mengenai Pasal 9 Konstitusi 1947. Aktor-aktor politik yang ditelaah ke dalam penelitian ini adalah negara Jepang sebagai negara yang terikat oleh Konstitusi 1947, Perdana Menteri Shinzo Abe sebagai pencetus wacana perubahan konsitusi, Cina dan Korea Utara yang merupakan dua negara tetangga Jepang yang berpotensi menjadi ancaman bagi kedaulatan Jepang serta Amerika Serikat sebagai negara yang memberikan perlindungan militer kepada Jepang pasca kekalahan Jepang pada Perang Dunia II.

PEMBAHASAN

DINAMIKA PEMERINTAHAN SHINZO ABE

Shinzo Abe adalah Perdana Menteri Jepang pada periode 2006-2007 dan menjabat kembali pada periode 2012-2015 dan 2015-2018. Masa kepemimpinannya membuat Shinzo Abe menjadi Perdana Menteri ketiga dengan masa jabatan terpanjang setelah Perang Dunia. Pertama kali menjabat pada tahun 2006 pada umur 52, Shinzo Abe adalah Perdana Menteri termuda sekaligus merupakan Perdana Menteri yang lahir setelah Perang Dunia II. Abe terkenal sebagai sosok politikus yang agresif di Tokyo, ia menonjol terutama karena keinginannya untuk mengamandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang.

Perubahan terhadap Pasal 9 akan memberikan dampak besar bagi kebijakan keamanan nasional Jepang. Selama ini pemerintah Jepang memahami bahwa merupakan sebuah pelanggaran terhadap konstitusi jika Jepang menggunakan kekuatan pertahanannya untuk mempertahankan negara lain sementara Jepang sendiri tidak berada dalam serangan langsung. Interpretasi tersebutlah yang hendak diubah oleh Pemerintahan Abe, sehingga memungkinkan Jepang menggunakan SDF untuk menghadapi serangan terhadap sekutu-sekutu Jepang, termasuk AS. Argumen bahwa Jepang tidak akan mampu menjalankan kewajiban-kewajiban internasionalnya, misalnya di bawah PBB, tanpa didukung kekuatan militer yang normal juga melandasi upaya Abe.

Pada kenyataannya dalam tahun-tahun belakangan ini Jepang telah mengambil langkah menuju peran kemiliteran yang normal. SDF telah beberapa kali berpartisipasi dalam pasukan militer multinasional yang dipimpin oleh AS, misalnya keterlibatan dalam perang di Afghanistan. SDF juga bergabung dalam Operasi Penjaga Perdamaian PBB. Di Afghanistan kapal-kapal laut Jepang beroperasi di Samudera Hindia untuk memberi bahan bakar dan bantuan logistik lainnya bagi pesawat-pesawat AS. Di bawah PM Junichiro Koizumi, pasukan Jepang juga bergabung dalam misi penjaga perdamaian di Irak. Penempatan pasukan di Irak merupakan keikutsertaan pertama ke dalam zona perang sejak PD II. Misi-misi semacam itu selalu memicu perdebatan publik mengenai apakah tindakan semacam itu bertentangan atau tidak dengan Konstitusi Jepang.

Karena itu pula Abe menginginkan Pasal 9 diubah agar lebih sesuai dengan realita SDF saat ini. Untuk melancarkan upayanya mengamandemen Pasal 9, Pemerintahan Abe terlebih dahulu berupaya mengubah Pasal 96 yang mengatur proses perubahan konstitusi. Dengan mengubah Pasal 96, Abe bermaksud untuk mempermudah proses perubahan konstitusional lainnya, termasuk mengamandemen

Pasal 9. Sekalipun partai Abe, Partai Demokrat Liberal Jepang (LDP) mendominasi di Majelis Rendah dan Majelis Tinggi, langkah pemerintahan Abe tidak akan berjalan mudah karena menurut hasil jajak pendapat 59 persen responden menyatakan menolak perubahan atas Pasal 9.

Di periode kedua pemerintahannya pun (2015-2018) upaya Shinzo Abe mengamandemen konstitusi pasifis mengalami naik turun. Sebelumnya, pada September 2013 di hadapan Majelis Umum PBB, Abe menyatakan Jepang menganut prinsip “Pasifisme Positif”. Abe mendirikan “Dewan Keamanan Nasional” yang bertujuan melenyapkan pengawasan parlemen atas militer. Masih di tahun yang sama, parlemen Jepang mensahkan UU Perlindungan Rahasia Negara. Abe beralih bahwa UU ini hanya akan diterapkan pada kebocoran rahasia negara yang mengancam keamanan nasional, diplomasi, keselamatan publik, dan tindakan-tindakan kontra-terorisme. UU tersebut dapat memenjarakan PNS yang membocorkan rahasia negara selama 10 tahun dan jurnalis yang mendukung pembocor rahasia bisa mendapat ancaman bui lima tahun. Delapan puluh persen warga Jepang menolak UU tersebut.

Pada 2014, Abe mencabut larangan ekspor senjata. Setahun berikutnya, setelah mengadopsi interpretasi baru terhadap pasal 9 Jepang melakukan misi global bersama AS. Fasilitas-fasilitas militer baru pun mulai dibangun di Okinawa, Guam, kepulauan Mariana, dan kepulauan di barat daya Jepang yang berbatasan dengan Taiwan. Partai Liberal Demokratik Jepang tengah mempertimbangkan amandemen pasal 9. Respons publik terbelah. Empat puluh sembilan persen responden survey yang diselenggarakan Kyodo News mendukung amandemen sementara 47 persen menentang. Sementara menurut polling NHK, 25 persen mendukung, dengan 57 persen menentang.

Pada 2015, Majelis Tinggi Parlemen meloloskan RUU yang memungkinkan SDF (militer Jepang) untuk terlibat dalam pertempuran di luar perairan Jepang. Tujuan diloloslkannya RUU ini adalah memperluas kapasitas militer dalam menghadapi ancaman dari Tiongkok dan Korea Utara. Dengan latar belakang tersebut, terpilihnya Shinzo Abe untuk duduk di kursi perdana menteri membuka ruang penguatan militer dalam kerangka memproyeksikan kekuatan Jepang secara regional secara bertahap. Gavan McCormack, Profesor emeritus kajian Asia Timur dari Australian National University, mencatat enam langkah Abe mengubah Jepang dari “negara damai” ke “negara perang.”

ANCAMAN KEAMANAN DARI AGRESIVITAS KOREA UTARA

Situasi keamanan yang dihadapi Jepang saat ini adalah yang paling berbahaya sejak Perang Dunia II karena provokasi Korea Utara yang “tidak dapat diterima,” kata Perdana Menteri Shinzo Abe pada hari Kamis, 4 Januari 2018 saat dia berjanji untuk memperkuat pertahanan untuk melindungi rakyat Jepang. Ketegangan di wilayah tersebut telah meningkat, terutama sejak Korea Utara melakukan uji coba nuklir keenam dan terbesar pada bulan September 2017, dan kemudian pada bulan November, mengatakan bahwa mereka telah berhasil menguji rudal balistik antar benua baru yang dapat menjangkau seluruh daratan Amerika Serikat (AS), lihat Gambar 3.4, 3.5 dan 3.6. “Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa lingkungan keamanan di sekitar Jepang paling parah sejak Perang Dunia Kedua. Saya akan melindungi kehidupan masyarakat dan kehidupan damai dalam situasi apapun,” kata Abe pada konferensi pers di tahun baru.

Abe mengatakan Jepang akan mengambil langkah baru untuk memperkuat postur pertahanannya namun dia tidak membahas secara spesifik. Pemerintah menyetujui sebuah rekor penetapan anggaran militer bulan lalu, dengan pengeluaran untuk pertahanan yang lebih besar dibandingkan tahun keenam, meningkat 1,3 persen menjadi 5,19 triliun yen (US\$ 46 milyar), dengan pos terbesar sejumlah 137 milyar yen untuk memperkuat pertahanan terhadap rudal balistik Korea Utara. Alokasi belanja militer persenjataan Jepang dan negara-negara Asia Timur terus meningkat. Abe juga menekan Donald Trump dengan mengingatkan fakta mengenai masyarakat sipil Jepang yang diculik oleh Korea Utara. Sebuah laporan di tahun 2014 oleh *United Nations Human Rights Council* menyebutkan bahwa ratusan warga Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara lain diculik oleh Korea Utara setelah berakhirnya Perang Korea tahun 1953. Tidak diketahui dengan pasti berapa banyak pelayan wanita yang disebut *comfort woman* tetapi pemerintah Jepang memperdebatkan jumlah 200.000 seperti yang dilaporkan sebelumnya di seluruh Asia.

KEBANGKITAN CINA

Selama sepuluh tahun terakhir, hampir tidak ada pembicaraan mengenai perkembangan hubungan internasional di kawasan Asia-Pasifik yang tidak terkait dengan Republik Rakyat Cina. Hal

ini merupakan konsekuensi dari kebangkitan RRC yang begitu spektakuler, sebagai hasil dari proses modernisasi ekonomi yang panjang dan berkesinambungan sejak awal 1980-an. Dari sisi ekonomi, RRC berhasil mengangkat ratusan juta rakyatnya dari bawah garis kemiskinan dan membangun struktur industri yang kuat. Pada 2010, RRC menggantikan Jepang sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, setelah Amerika Serikat.

Kekuatan militer RRC, meskipun masih jauh di bawah kekuatan dan daya jangkau militer AS, kini menjadi begitu hebat dan menakutkan di kawasan Asia Pasifik. Alokasi anggaran US\$ 91,5 miliar (2011) dan terus meningkat dua digit setiap tahun, menjadikan RRC sebagai negara dengan anggaran pertahanan kedua terbesar setelah AS. Dengan mulai dioperasikannya kapal induk Shi Lang tahun lalu, dan proses produksi dua kapal induk lainnya memasuki tahap penyelesaian, Angkatan Laut RRC kini telah memasuki tahap perkembangan untuk menjadi “kekuatan laut biru” dengan kemampuan proyeksi ke laut lepas.

Belakangan ini, dengan ekspansi investasi dan bisnis sampai ke Amerika Latin dan Afrika, Cina mulai mentransformasikan posisinya dari kekuatan regional menjadi kekuatan global. Dengan kata lain, Sang Naga Merah dari Utara itu telah menjadi kekuatan global baru, yang akan mengubah tatanan ekonomi-politik dunia. Dan implikasi kebangkitan Cina sebagai kekuatan baru itu akan lebih terasa di kawasan Asia-Pasifik.

Faktor penting ekonomi Cina bagi negara-negara di kawasan ini tidak dapat diabaikan lagi. Cina bahkan telah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di kawasan menggantikan Jepang. Bagi ASEAN, misalnya, Cina telah menjadi mitra dagang terbesar. Peran Cina sebagai investor baru menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. Prospek pemulihan ekonomi AS dan Jepang juga bergantung pada sehat-tidaknya ekonomi RRC. Kebangkitan Cina telah mulai mengubah perimbangan kekuatan antar negara besar di kawasan. Dominasi AS yang telah berjalan selama lebih dari enam dekade kini mulai bergeser dengan meningkatnya pengaruh Cina, yang pada gilirannya membuat gugup sekutu terdekat AS, seperti Jepang.

Sementara dalam hal modernisasi persenjataan, Cina melakukannya dalam semua matra tempurnya, darat, laut dan udara. Beberapa dari modernisasi tersebut adalah 1) Menambah armada udaranya dengan SU-30 versi penyerang kapal laut (*naval strike version*) yang mampu meluncurkan anti-ship cruise missiles (ASCMs); 2) Memesan 4 buah kapal selam kelas KILO dari Rusia; 3) Memproduksi kapal selam diesel-listrik (SONG) yang memiliki kemampuan menembakkan misil dari bawah laut, dan; 4) Mengganti 20 buah CSS-4 Mod 1, Intercontinental Ballistic Missile (ICBMs) dengan CSS-4 Mod 2 yang memiliki jangkauan lebih jauh.

Dari segi anggaran militer pun demikian. Dalam beberapa tahun ke belakang ini, anggaran pertahanan Cina selalu mengalami peningkatan. Secara konsisten Cina meningkatkan anggaran militernya, rata-rata sebesar dua digit dalam 13 tahun terakhir. Tahun 1994 anggaran militer Cina meningkat sebesar 18%, tahun 1995 meningkat lagi sebesar 21%, tahun 2005 meningkat sebesar 12,6%, tahun 2006 sebesar 14,7% dan tahun 2007 meningkat sebesar 17,8% menjadi US\$ 44,94 miliar. Sepanjang tahun 1998 hingga 2004, belanja militer Cina naik sebesar 96,7%.

KENDALA PERTAHANAN JEPANG DAN PASAL 9 KONSTITUSI 1947

Keberadaan Pasal 9 sendiri telah memberikan kebanggaan kepada sebagian warga Jepang sebagai satu-satunya negara yang dengan tegas menolak perang dalam konstitusinya. Bagi mereka, Pasal 9 bukan hanya sebuah kalimat konstitusi melainkan sudah menjadi nilai dan budaya yang melekat sejak berakhirnya PD II. Jelas perubahan pada Pasal 9 akan memengaruhi konstruksi identitas nasional Jepang. Bagi para penentang rencana perubahan itu, konstitusi anti perang telah menghindarkan perang sejak tahun-tahun 1940-an, sehingga negara itu dapat memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, publik Jepang juga menyadari perlunya peningkatan kekuatan militer akibat adanya ketakutan terhadap kemajuan militer Cina di tengah pemotongan anggaran pertahanan AS.

Upaya-upaya untuk meningkatkan kekuatan militer Jepang akan memiliki arti yang berbeda jika diikuti dengan revisi Pasal 9. Tanpa perubahan Pasal 9, senjata-senjata mutakhir Jepang tetap hanya dapat digunakan jika Jepang yang mengalami serangan secara langsung, yang artinya tidak terjadi pergeseran sifat dasar militer Jepang sebagai kekuatan pertahanan diri. Dengan merevisi Pasal 9, setiap peningkatan kekuatan militer Jepang akan secara signifikan memengaruhi perimbangan kekuatan di kawasan.

Untuk mengamandemen konstitusi yang ada Pemerintah Jepang di bawah kepemimpinan Shinzo Abe harus mampu melalui dua tahap seleksi. Pertama, mendapatkan persetujuan Diet untuk melakukan referendum amandemen konstitusi. Selanjutnya, kedua, mendapatkan persetujuan rakyat melalui referendum untuk melakukan amandemen konstitusi.

Tidak mudah bagi Abe untuk lolos dari proses seleksi tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, jajak pendapat terbaru yang dikeluarkan Asahi Shimbun memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat Jepang (78%) berpandangan bahwa pasal 9 tersebut telah menciptakan perdamaian bagi Jepang. Selain itu, 70% dari responden berkeinginan mempertahankan status JSDF (*Japan Self Defense Forces*) sebagaimana saat ini.

Masih tingginya persepsi ancaman terhadap Jepang di level internasional tampaknya menjadi alasan **pertama** bagi masyarakat Jepang untuk mempertahankan pasal 9 tersebut. Persepsi ancaman dari negara-negara yang tinggi terhadap Jepang, jika diikuti dengan perubahan pasal 9 konstitusi Jepang dipandang oleh masyarakat akan makin meningkatkan kerentanan ancaman keamanan bagi Jepang. **Kedua**, makin berkurangnya dukungan masyarakat terhadap pemerintahan Shinzo Abe. Perilaku Shinzo Abe yang provokatif merupakan salah satu alasan mudurnya dukungan dari masyarakat tersebut. Tindakan provokatif tersebut dapat dilihat dari pernyataan Abe yang menolak keterlibatan Jepang selama PD II di dalam fenomena “jugun ianfu”. Dimana pernyataan tersebut menuai kritik dari negara-negara yang mengalami pendudukan Jepang dan kembali meningkatkan ketegangan di kawasan. Pernyataan Abe yang kontroversial dan provokatif tersebut tentunya dilihat oleh masyarakat sebagai tindakan yang akan meningkatkan kerentanan ancaman keamanan Jepang. Selain itu, kabinet Abe juga tercemari oleh sejumlah skandal korupsi dan salah manajemen (dana pensiun). Turunnya dukungan terhadap pemerintahan Abe terlihat dari jumlah kursi yang diperoleh LDP dalam Pemilu Majelis Tinggi yang lalu. LDP hanya memperoleh 46 kursi dari 121 kursi yang diperebutkan. **Ketiga**, hasil penelitian *The Chicago Council on Global Affairs* tahun 2006 memperlihatkan bahwa bagi masyarakat Jepang ancaman utama yang akan dihadapi Jepang sepuluh tahun ke depan berturut-turut adalah: 1) pemanasan global; 2) persoalan terorisme; 3) ketersediaan energi; 4) penyakit (AIDS, Avian Flu, dll).

Sementara berkaitan dengan kebijakan luar negeri masyarakat Jepang menempatkan perbaikan lingkungan hidup di prioritas pertama, kemudian disusul oleh; 2) pencegahan penyebaran senjata nuklir; 3) menjamin ketersediaan energi, dan; 4) menjamin pekerjaan bagi masyarakat Jepang. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa masyarakat Jepang lebih tertarik pada isu-isu keamanan insani (*human security*) atau keamanan non-tradisional daripada isu-isu keamanan militer. Prioritas masyarakat Jepang pada masalah-masalah keamanan insani juga tampak dari hasil jajak pendapat yang dilakukan Asahi Shimbun. Survey menunjukkan bahwa 84% responden menginginkan amandemen konstitusi yang berkaitan dengan perubahan sistem dan pemberian jaminan hak-hak asasi manusia yang lebih luas, dibandingkan peningkatan kemampuan militer.

Unjuk kekuatan Cina berlangsung pada saat yang sama ketika Amerika Serikat (AS) menuntut kesiapan sekutu-sekutunya di seluruh dunia untuk memikul beban pertahanan mereka sendiri. Memang, serangan verbal Presiden AS Donald Trump terhadap aliansi bahkan telah menimbulkan kekhawatiran di beberapa kalangan atas keandalan Amerika Serikat. “Trump telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa Jepang perlu memikul lebih banyak beban aliansi dan melakukan lebih banyak untuk mempertahankan dirinya sendiri,” kata Neill. “Seperti yang mantan menteri pertahanan Jepang katakan, ‘Jika mengenai aliansi, 10 persennya adalah penghindaran dan 90 persennya jaminan’—dan apa yang Abe temukan adalah bahwa jaminan telah dikurangi cukup banyak oleh Trump.” Permintaan Donald Trump untuk meningkatkan belanja pertahanan dan peningkatan kemampuan ini selaras dengan ambisi Shinzo Abe sendiri, dan Jepang tidak sendirian dalam menghindari bayangan Cina yang semakin meluas.

PENURUNAN KEKUATAN AMERIKA SERIKAT DI ASIA TIMUR

Setelah Perang Dunia II, AS memang tampil menjadi negara adidaya. Bentuk pengaruh mereka di penjuru dunia tak hanya terlihat dari hegemoni ekonomi, tapi juga militer. Biasanya, pangkalan-pangkalan militer AS dibangun di wilayah negara sahabat. Tak satupun pangkalan dibangun di negara komunis maupun negara eks Blok Timur. Kalaupun ada, pangkalan militer itu biasanya sudah dibangun ketika Perang Dingin. Akan tetapi, setelah Amerika Serikat selama kurang lebih 70 tahun mendominasi kawasan Asia dengan *soft* dan *hard power*, semakin banyak pengamat yang setuju

bahwa pengaruh Amerika Serikat semakin mendangkal. Kekuatan Cina semakin menyaingi Amerika Serikat, terbukti dengan kecenderungan negara-negara Asia Timur dan Tenggara untuk condong kepada Cina dibandingkan ke Amerika Serikat.

Sejak tahun 1990 hingga 2000, Amerika Serikat telah menyadari bahwa kebangkitan Cina sebagai kekuatan baru akan mengancam hegemoni Amerika Serikat di Asia, atau bahkan di dunia. Peningkatan perekonomian Cina yang selalu berada di atas 10% per tahun adalah indikasi bahwa pengaruh Amerika Serikat sebagai negara adidaya dapat tergerus apabila Amerika Serikat bersikap pasif di kawasan ini. Ketegangan politik dan militer di kawasan ini pun tidak berhasil diredam hanya dengan 100.000 pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di kawasan ini. Itulah sebabnya kunci dari kesuksesan Amerika Serikat adalah memperkuat aliansi di Asia Timur.

Enam tahun setelah kebijakan pivot pada Asia Timur Presiden Obama, peningkatan investasi militer di region Asia Timur, yaitu di Jepang dan Korea Selatan, mencapai angka tertinggi. Akan tetapi, tantangan atas kredibilitas Amerika Serikat sebagai negara adidaya semakin kentara. Di Laut Cina Selatan, perairan yang kaya akan minyak bumi dan merupakan salah satu wilayah yang paling diperebutkan di muka bumi, Amerika Serikat dan aliansinya harus bersaing dengan Cina. Cina memperluas dominasi di Laut Cina Selatan dengan memperbanyak basis militer, memperkuat shelter misil, dan lain-lain. Kesepakatan antara Vietnam dan Cina yang baru-baru ini tercapai mengenai perairan Laut Cina Selatan menunjukkan bahwa negara-negara di Asia tidak mempercayai Amerika Serikat lagi untuk membantu menyelesaikan pertikaian di kawasan ini.

Di Asia Tenggara persaingan paling jelas AS dan Cina terlihat di Laut Cina Selatan. Sejak Trump masuk Gedung Putih, ketegangan di Laut Cina Selatan terus memudar seiring Washington dan Beijing lebih menyoroti kawasan Semenanjung Korea. Di tengah rawannya situasi di Semenanjung Korea, Negeri Tirai Bambu tidak mengendurkan aktivitasnya membangun pangkalan udara dan radar di Laut Cina Selatan.

Beberapa negara di Asia Tenggara sudah mulai lebih rapat ke Cina seiring pengaruh AS di kawasan ini kian memudar. Presiden Filipina Rodrigo Duterte tahun lalu mulai membangun kerja sama lebih dekat dengan Cina. India dan sejumlah negara Asia lainnya, termasuk Jepang kini sudah menganggap AS sebagai 'kekuatan yang memudar' dan tak bisa lagi dijadikan sandaran untuk kepentingan pertahanan. Kondisi ini bisa terlihat di masa depan lewat negara-negara Asia, terutama India dan Jepang yang kini bekerja sama untuk kepentingan pertahanan. Setelah bulan lalu AS mengumumkan akan menunda bantuan militer bagi Pakistan, kini Pakistan berpaling ke Rusia dan Cina. Mantan Menteri Luar Negeri Pakistan Hina Rabbani Khar mengatakan Cina sudah menjadi negara sahabat sejak lama. "Cina barangkali satu-satunya rekan strategis Pakistan, bukan cuma untuk hari ini atau lima tahun terakhir tapi sudah selama empat dekade. Dengan Cina kami saling melengkapi kepentingan bersama," kata Khar.

Menurut Dosch, Asia Timur sudah mandiri dan tidak memerlukan bantuan dari Amerika Serikat sebesar yang mereka butuhkan dahulu. Lagipula AS pun sempat mengalami krisis di negaranya yang menjadi dasar prediksi Dosch mengenai turunnya peran Amerika sebagai *hub* di Asia Timur. Namun, baik Dosch ataupun Ikenberry mempunyai persamaan pendapat mengenai kondisi AS yang tidak sehegemon dulu setelah Cina muncul sebagai kompetitor. Ikenberry berpendapat bahwa dalam hubungan kerjasama bilateral negara Asia Timur dengan Amerika akan terus terjalin namun berjalan stagnan sedangkan hubungan bilateral yang dilakukan dengan negara *rising* Cina, dianggap akan lebih menjanjikan. Baginya, hampir seluruh negara di dunia sekarang ini memasukkan Cina sebagai agenda penting bagi hubungan kerjasama bilateral mereka.

DAMPAK PENURUNAN SUPREMASI AMERIKA SERIKAT TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL DENGAN JEPANG

Jepang adalah tuan rumah bagi angkatan bersenjata AS dimana sebanyak 47,050 pasukan AS berada di Jepang. Menurut data *International Institute for Strategic Studies* (IISS) mayoritas adalah personel angkatan laut. Yokosuka di Jepang adalah pusat armada kapal ketujuh AS, yang mengerahkan sekitar 20 kapal, termasuk kapal induk permanen satu-satunya USS Ronald Reagan.

Dibawah pemerintahan Presiden Barack Obama, Tokyo dan Washington secara cukup mudah menyepakati pendirian tentang memperkuat langkah-langkah sanksi terhadap RDR Korea dan memperkuat kerjasama tentang keamanan, namun kedua belah pihak masih mengalami perbedaan

pendapat mengenai apakah Jepang berpartisipasi pada perundingan Traktat Kemitraan Trans Pasifik (TPP) atau tidak.

Ini adalah salah satu kesulitan yang dihadapi Shinzo Abe ketika berkunjung ke Amerika Serikat. Menurut kalangan analis, Perdana Menteri Shinzo Abe memahami perlunya sikap positif terhadap TPP untuk bisa mengusahakan kepercayaan pemerintahan Presiden Barack Obama tetapi di Jepang, hal ini merupakan masalah yang tidak sederhana. Dewasa ini banyak legislator di dalam dan luar Partai Liberal Demokrat (LDP) yang berkuasa menentang TPP karena merasa cemas bahwa traktat ini akan berpengaruh terhadap pasar hasil pertanian Jepang, khususnya beras dan daging. Sebelum kunjungan di AS beberapa pekan, Jepang telah sebagian menerima prasyarat yang diajukan AS ketika negara ini berpartisipasi pada perundingan-perundingan TPP dengan cara melonggarkan ketentuan membatasi impor daging sapi AS yang menjadi efektif ketika muncul penyakit sapi gila kira-kira satu dekade ini. Akan tetapi, tampaknya itikad baik ini belum cukup.

Dibawah pemerintahan Presiden Trump, Jepang bersama Cina dan Meksiko disebut sebagai negara-negara yang secara tidak adil mengambil keuntungan dari kebijakan perdagangan yang menyebabkan defisit perdagangan Amerika Serikat, Donald Trump menuduh Tokyo secara tidak benar mendevalusi mata uangnya untuk meningkatkan ekspor. Jepang mencatat surplus perdagangan 6,8 triliun yen dengan Amerika Serikat tahun lalu, turun 4,6 persen dari tahun 2015, tapi pengiriman mobil ke Amerika naik untuk tahun kedua berturut-turut, menurut data Kementerian Keuangan Jepang.

Trump sebelumnya membuat benteng dengan Jepang dan akan mengenakan tarif lebih besar untuk impor mobil non AS. Di bidang pertanian dan peternakan, Trump diminta oleh petani AS untuk melobi tarif ekspor ke Jepang. Hal ini agar daging sapi dan babi dari AS bisa bersaing dengan daging dari Australia. Sejak masa kampanye, Trump berjanji akan negosiasi dengan Jepang agar bisa mendapat tarif lebih murah. "Saya akan mengurus lebih cepat. kedudukannya akan sama dalam satu hari," ujar Trump seperti dikutip media AS.

Pada akhirnya, pemimpin Jepang dan Amerika Serikat sepakat menjalin kerja sama perdagangan bilateral. Keduanya akan membentuk kerangka kerja sama bilateral yang akan dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Jepang Taro Aso dan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence. Keputusan itu merupakan hasil pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Kesepakatan ini sekaligus sebagai titik temu antara kedua negara di bidang perdagangan. Sementara menurut Rich Ellings, *Presiden National Bureau of Asia Research* mengatakan, kesepakatan tersebut harus diambil oleh Abe. Karena pihaknya juga sedang berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kerjasama dengan AS adalah cara melindungi para produsen mobil.

Dalam pidato pertamanya ke parlemen (Diet), setelah pemilihan perdana menteri pada November 2017, Abe menegaskan ia akan melakukan diplomasi yang "agresif" termasuk meningkatkan tekanan terhadap Korea Utara. Abe, yang menganggap Korea Utara sebagai isu keamanan paling serius yang dihadapi Jepang sejak Perang Dunia II, mengatakan: "Kami akan meningkatkan kekuatan pertahanan Jepang, termasuk kemampuan pertahanan rudal, untuk melindungi kehidupan masyarakat dan perdamaian."

Jepang dilaporkan telah membeli senjata misil yang ditujukan untuk menangkal ancaman misil Korea Utara senilai US\$ 133 juta atau setara dengan 1.8 triliun rupiah. Selain itu untuk memperluas kemampuan militernya, Jepang memajukan rencana untuk kapal induk yang dapat meluncurkan jet tempur. Rencana-rencana itu—yang terkandung dalam rancangan pedoman pertahanan baru yang disetujui oleh partai-partai yang memerintah, akan secara efektif mempersenjatai Jepang dengan kapal induk pertamanya sejak Perang Dunia II dengan kekuatan-kekuatan yang berpotensi menyerang jauh di luar wilayah Jepang. Langkah itu berisiko memicu perdebatan politik di Jepang, mengenai apakah kemampuan militer yang diperluas seperti itu sesuai dengan konstitusi damai negara. Rencana tersebut dapat ditafsirkan sebagai senjata ofensif melampaui yang dianggap perlu untuk membela diri.

Untuk mendukung hal tersebut diatas, pemerintahan Shinzo Abe dan partai pendukungnya *Liberal Democratic Party* di penghujung tahun 2018 sudah mengajukan revisi Konsitusi, yang intinya mengatur agar Angkatan Militer Pertahanan (*Self-Defence Forces*) akan mengambil tindakan yang dianggap dibutuhkan untuk menjaga pertahanan. Kabinet Perdana Menteri Shinzo Abe bertujuan untuk mendukung pedoman yang direvisi bulan ini. Jika disetujui, perubahan ini akan berlaku di tahun 2020, dimana Jepang berhak untuk melengkapi dirinya dengan angkatan dan perangkat perang untuk tujuan menjaga diri dari ancaman. *Langkah yang berisiko memicu perdebatan politik di Jepang,*

mengenai apakah kemampuan militer yang diperluas seperti itu sesuai dengan konstitusi damai negara.

KESIMPULAN

Di tengah kondisi dilematis yang dihadapinya, Jepang pada kenyataannya telah melakukan upaya-upaya membangun kembali militernya. Strategi yang dilakukan Jepang adalah memanfaatkan kondisi-kondisi di mana pembangunan militer yang dilakukannya seolah-olah adalah suatu keharusan yang dipaksakan oleh pihak luar terutama oleh AS. Dengan memanfaatkan hubungannya dengan AS yang pada titik tertentu semakin terbebani dengan kewajibannya melindungi keamanan Jepang, Jepang berhasil mendapatkan simpati publik domestik dan menekan ketakutan negara-negara tetangganya terhadap kebangkitan kembali militerismenya.

Sejak momentum pembangunan kembali kekuatan militer tersebut strategi Jepang terus berjalan dengan memanfaatkan momentum-momentum politik keamanan internasional yang melibatkan AS. Pada awal mulainya Perang Dingin (tahun 1953), Jepang membangun 152.000 personil militer dari 172.000 yang diminta oleh AS. Pada tahun 1955 Jepang kembali membangun militernya menjadi 156.834 dari total 179.737 yang diminta oleh AS. Pada momentum perang Vietnam tahun 1960 jumlah tersebut meningkat menjadi 206.001 atas dasar permintaan AS dari total 300.000 personil. Pada tahun 1973 yaitu ketika AS kalah dalam Perang Vietnam dan kemudian AS mundur dan mengurangi kekuatannya di kawasan Far East, Jepang kembali membangun sebanyak 286.200 dari total 350.000 personil yang diminta oleh AS. Pada masa-masa berikutnya Jepang terus melakukan hal yang sama yaitu memanfaatkan situasi-situasi yang di satu sisi terlihat sulit tetapi malah memberikannya kesempatan untuk membangun kekuatan militernya. Pada tanggal 10 Desember 2004, Jepang meluncurkan sebuah Program Rencana Pertahanan baru yang merupakan sebuah loncatan dari sistem pertahanan yang sekedar membela diri hingga siap membela diri dengan rudal.

Secara garis besar dalam hal personil militer terjadi penurunan atau deklinasi pada posture kekuatan pertahanan Jepang, namun dari segi persenjataan dan peralatan pertahanan dan keamanan Jepang mengalami modernisasi yang sangat signifikan. Modernisasi tersebut mencakup lima area; *Ground, Maritime, Air Defense, IT Network, Research and Development*. Di dalam program tersebut disebutkan tentang kerja sama *research and development* dengan AS dalam hal pengembangan *theater missile defense, fixed wing maritime patrol/ASW P-3C dan C-1 transport replacements*; pembangunan *defense information infrastructure (triservice computer integration program, dan common operating environment*. Modernisasi ini akan menyebabkan Jepang memiliki kekuatan misil yang canggih serta akan sangat unggul dalam peningkatan kinerja persenjataan dan peralatan militer.

Dengan modernisasi tersebut maka Jepang akan mampu mengamankan kawasannya sejauh mungkin tanpa tergantung lagi pada AS. Misalnya dengan *new mid-refuelling tankers* jarak jangkauan *fighter aircraft* Jepang akan bertambah hingga mencapai seluruh Asia Timur. Kemampuan untuk *counter cyber attack* dengan pengembangan *defense information infrastructure* akan memberikan kemampuan bagi Jepang untuk mengacaukan sistem komunikasi lawan.

Shinzo Abe merupakan salah satu tokoh yang secara konsisten mengupayakan amandemen Pasal 9. Abe sudah menyerukan revisi konstitusi sejak ia menjabat Perdana Menteri di tahun 2006–2007. Dalam satu pernyataan memperingati 60 tahun konstitusi, Abe menyampaikan perlunya suatu era baru agar Jepang dapat berperan lebih besar dalam keamanan global. Untuk itu Abe menetapkan perombakan konstitusi sebagai salah satu prioritas utamanya. Abe sangat serius dalam upayanya memperluas peran militer Jepang. Hal itu misalnya ditunjukkan ketika ia mengupayakan persetujuan parlemen untuk memperpanjang misi militer Jepang di Afghanistan. Pada saat itu Abe mengatakan bahwa dia akan mengundurkan diri jika gagal mendapat persetujuan parlemen. Selanjutnya dalam masa kampanye tahun lalu, Abe kembali menyampaikan keinginan untuk merevisi Pasal 9, dan segera setelah terpilih menjadi perdana menteri pada Desember 2012 Pemerintahan Abe memulai upaya-upaya tersebut.

Perubahan terhadap Pasal 9 akan memberikan dampak besar bagi kebijakan keamanan nasional Jepang. Selama ini pemerintah Jepang memahami bahwa merupakan sebuah pelanggaran terhadap konstitusi jika Jepang menggunakan kekuatan pertahanannya untuk mempertahankan negara lain sementara Jepang sendiri tidak berada dalam serangan langsung. Interpretasi tersebutlah yang hendak diubah oleh Pemerintahan Abe, sehingga memungkinkan Jepang menggunakan SDF untuk menghadapi serangan terhadap sekutu-sekutu Jepang, termasuk AS. Argumen bahwa Jepang tidak akan mampu menjalankan kewajiban-kewajiban internasionalnya, misalnya di bawah PBB, tanpa didukung kekuatan militer yang normal juga melandasi upaya Abe.

Pada kenyataannya dalam tahun-tahun belakangan ini Jepang telah mengambil langkah menuju peran kemiliteran yang normal. SDF telah beberapa kali berpartisipasi dalam pasukan militer multinasional yang dipimpin oleh AS, misalnya keterlibatan dalam perang di Afghanistan. SDF juga bergabung dalam Operasi Penjaga Perdamaian PBB. Di Afghanistan kapal-kapal laut Jepang beroperasi di Samudera Hindia untuk memberi bahan bakar dan bantuan logistik lainnya bagi pesawat-pesawat AS. Di bawah PM Junichiro Koizumi, pasukan Jepang juga bergabung dalam misi penjaga perdamaian di Irak. Penempatan pasukan di Irak merupakan keikutsertaan pertama ke dalam zona perang sejak PD II. Misi-misi semacam itu selalu memicu perdebatan publik mengenai apakah tindakan semacam itu bertentangan atau tidak dengan Konstitusi Jepang. Karena itu pula Abe menginginkan Pasal 9 diubah agar lebih sesuai dengan realita SDF saat ini.

Sementara mengupayakan revisi konstitusi, Pemerintahan Abe juga mengusulkan kenaikan anggaran pertahanan untuk tahun 2014 dengan argumen bahwa diperlukan penguatan pertahanan untuk merespons pertumbuhan pesat militer Cina dan ancaman nuklir Korea Utara, Pemerintahan Abe mengajukan kenaikan anggaran pertahanan tertinggi sejak 22 tahun terakhir. Pada bulan Agustus lalu, Jepang mengumumkan anggaran pertahanan tahun 2014 akan mencapai US\$ 49 milyar yang akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan pulau-pulau, termasuk pulau yang diklaim oleh Cina.

Kenaikan anggaran pertahanan sebesar tiga persen tersebut merupakan yang terbesar sejak tahun 1992, dan merupakan titik balik karena sejak tahun 2002 sampai 2012 anggaran pertahanan Jepang selalu mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan Cina, anggaran pertahanan Jepang jauh tertinggal. Belanja pertahanan Cina pada tahun 2012 mencapai US\$ 166 milyar, atau tiga kali lebih besar dari anggaran Jepang. Antara tahun 2003 sampai 2012, anggaran pertahanan Cina telah mengalami kenaikan sebesar 175 persen, sementara Jepang mengalami penurunan. Ketimpangan belanja pertahanan tersebut tampaknya telah menghasilkan sikap asertif Cina. Kapal-kapal patroli Cina sering kali bertindak keras di wilayah Kepulauan Senkaku yang dipersengketakan kedua negara.

Cina memang sedang mengalami transformasi drastis. Kekuatan militer Cina meskipun masih jauh di bawah kekuatan dan daya jangkau (*power outreach*) militer AS, kini menjadi begitu digdaya dan mengkhawatirkan di kawasan Asia Pasifik. Dari sudut politik-diplomatik, khususnya sejak dimulainya diplomasi “serangan simpatik” (*charm offensive*) dalam sepuluh tahun belakangan ini, pamor internasional RRC semakin mengesankan. Partisipasi aktif Cina dalam berbagai organisasi internasional dan kerangka kerja sama regional, baik sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), maupun di sejumlah organisasi regional, seperti ASEAN Plus Three (APT), APEC, ASEAN Regional Forum (ARF), dan East Asia Summit (EAS) semakin memperkokoh posisi negara itu sebagai aktor global yang berpengaruh yang dapat membawa implikasi positif dan negatif bagi kawasan Asia Pasifik. Sejauh ini, perkembangan yang ada menunjukkan bahwa Cina mampu mengelola kebangkitannya itu dengan baik. Beijing, yang selama dekade 1960 dan 1970 menjadi sumber instabilitas di kawasan, mulai tampil sebagai kekuatan baru yang mengedepankan kerja sama dan perdamaian. Namun jaminan “kebangkitan damai” (*peaceful rise*) yang kerap dikemukakan oleh RRC masih diwarnai oleh ketidakpastian. Kekhawatiran utama dari sebagian negara di kawasan adalah bagaimana Cina akan menggunakan kekuatan ekonomi dan militernya di masa mendatang, setelah Cina menjadi negara adidaya. Disamping itu, sulit memperkirakan sejauhmana menguatnya faktor nasionalisme dalam masyarakat Cina, yang kerap menuntut pemerintah Cina bertindak sesuai dengan statusnya sebagai layaknya sebuah negara besar (*daguo*), akan mempengaruhi kebijakan luar negeri negara itu. Misalnya, sikap sebagian pejabat tinggi

militer Cina yang mulai agresif dalam menghadapi sengketa teritorial dengan negara lain, mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara Asia.

Upaya pemerintahan Abe meningkatkan peran dan memperkuat militer Jepang memancing beragam respons di kawasan. Faktor sejarah masih membayangi Cina dan Korea Selatan, sehingga masyarakat di kedua negara selalu memandang peningkatan kekuatan militer Jepang akan mengembalikan karakter agresif Jepang di masa lalu. Begitu pula dengan Korea Utara, bagi mereka Jepang pasca-PD II tidak berbeda dengan Kekaisaran Jepang di abad ke-20. Tindakan-tindakan brutal tentara Jepang di Semenanjung Korea sepanjang paruh pertama abad ke-20 masih melekat di ingatan masyarakat Korea Selatan, dan diperburuk lagi oleh pernyataan-pernyataan menyakitkan yang sering kali dilontarkan tokoh-tokoh Jepang mengenai masa itu. Sikap Jepang yang semakin tegas dalam persoalan sengketa Kepulauan Diaoyu/Senkaku dengan Cina, merupakan faktor lainnya yang menyebabkan Cina juga khawatir dengan perkembangan militer Jepang.

Beberapa negara lainnya di kawasan yang sebelumnya juga memiliki kekhawatiran yang sama mengenai kembalinya militerisme Jepang kini tampak menyambut baik perubahan yang sedang terjadi. Filipina, Australia, dan Singapura yang pada dekade lalu selalu mendorong AS untuk melakukan pengawasan yang ketat atas setiap perkembangan militer Jepang, akhir-akhir ini menunjukkan sikap yang mendukung penguatan militer Jepang. Bagi sejumlah negara di kawasan, kekuatan militer Jepang memiliki arti strategis untuk mengimbangi kebangkitan Cina. Bagi AS, Jepang memiliki peran sentral dalam langkah Pacific Pivot AS. Perluasan peran dan peningkatan kekuatan militer Jepang secara langsung akan mengurangi beban AS dalam menjaga stabilitas kawasan di tengah tekanan keterbatasan anggarannya.

REFERENSI

Abe, Shinzo, *Towards a Beautiful Country: My Vision for Japan* (Vertical, 2006)

Barnaby, Frank, *How to Build a Nuclear Bomb and Other Weapons of Mass Destruction* (London, Granta Books, 2003)

Buzan, Barry, Ole Waver & Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis* (USA, Lynne Rienner Publisher, 1998)

Calder, Kent and Min Ye, *The Making of Northeast Asia* (California, Stanford: University Press, 2010)

Connors, Michael K., Remy Davidson and Jorn Dosch, *The New Global Politics of the Asia Pacific* (Routledge, 2017)

Chinworth, Michael. W, *Inside Japan's Defense Technology, Economics & Strategy* (New York, Brassey's, 1992)

Easton, David, *Analysist of Political System* (1957)

Govenments of Japan and the Unites States of America, *Constitution of Japan* (1947)

International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 1999-2000* (London, Oxford University Press, 2000)

Peters, B. Guy, *Institutional Theory in Political Science: The New Institutionalism* (New York, Continuum, 1999)

Schramm, Wilbur, *Mass Media and National Development* (California, Stanford University Press, 1964)

Takashi, Inoguchi and Purnendra Jain (eds), *Japanese Foreign Policy Today: A Reader* (Basingstoke, 2000)

Tomlinson, John, *Globalization and Culture* (Cambridge, Polity Press, 1999)

Tempo: Liputan Khusus Kapitalisme Buatan Cina, Edisi 23-29, Januari 2012

Abe Guts Article 9, diakses pada 9 Oktober 2016
<http://www.japantimes.co.jp/opinion/2014/07/02/editorials/abe-guts-article-9/>

Abe Shows Staying Power as Japan's Third Longest Serving Leader, diakses pada 26 September 2016, <https://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Policy-Politics/Abe-shows-staying-power-as-Japan-s-third-longest-serving-leader>

Analisis Jalan Mulus Shinzo Abe Menuju Perdana Menteri Terlama di Jepang, diakses pada 20 Desember 2018 (<https://www.matamatapolitik.com/analisis-jalan-mulus-shinzo-abe-menuju-perdana-menteri-terlama-di-jepang/>)

Bad Blood between North Korea and Japan Keeps Abe On the Outs, diakses pada 20 Desember 2018, <https://edition.cnn.com/2018/08/28/asia/japan-north-korea-relations-intl/index.html>

How History Haunts Shinzo Abe's Vision for Japan, diakses pada 9 Oktober 2016, <http://www.wsj.com/articles/how-history-haunts-shinzo-abes-vision-for-japan-1430076754>

Jepang di Bawah Abe: Makin Kanan, Makin Militeristik, diakses pada 22 Desember 2018, <https://tirto.id/jepang-di-bawah-abe-makin-kanan-makin-militeristik-ctkz>

Jepang Hadapi Situasi Paling Berbahaya Sejak Perang Dunia II Karena Korea Utara, diakses pada tanggal 20 Desember 2018, <https://www.matamatapolitik.com/jepang-hadapi-situasi-paling-berbahaya-sejak-perang-dunia-ii-karena-korea-utara/>

Memudarnya Pengaruh Amerika di Asia, Cina Kini Mengambil Alih, diakses pada 1 Januari 2019, <https://www.merdeka.com/dunia/memudarnya-pengaruh-amerika-di-asia-china-kini-mengambil-alih.html>

Menang Pemilu Partai, Abe Akan Jadi PM Jepang Terlama, diakses pada 20 Desember 2018, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180920144_603-113-331753/menang-pemilu-partai-abe-akan-jadi-pm-jepang-terlama

Mereka Yang Mengundurkan Diri Karena Merasa Gagal, diakses pada 20 Desember 2018, <https://tirto.id/mereka-yang-mengundurkan-diri-karena-merasa-gagal-cuZB>

Militer Amerika Mencengkram Dunia, diakses pada tanggal 24 Desember 2018, <https://tirto.id/militer-amerika-mencengkeram-dunia-bsTe>

Militer Jepang Matahari Terbit Kembali Berkibar di Indo Pasifik, diakses pada 21 Desember 2018, <https://www.matamatapolitik.com/militer-jepang-matahari-terbit-kembali-berkibar-di-indo-pasifik/>

North Korea's Missile and Nuclear Programme, diakses pada 1 Januari 2019, <https://www.bbc.com/news/world-asia-41174689>

PM Jepang Shinzo Abe Umumkan Pengunduran Dirinya, diakses pada 20 Desember 2018, <https://www.dw.com/id/pm-jepang-shinzo-abe-umumkan-pengunduran-dirinya/a-2932384>

Shinzo Abe Mengundurkan Diri sebagai PM Jepang, diakses pada 22 Desember 2018, <https://www.voaindonesia.com/a/a-32-2007-09-12-voa6-85274722/45037.html>

Trump Desak Militer Jepang Beli Senjata dari Amerika dan Aktif Lawan Korea Utara, diakses pada 21 Desember 2018, <https://www.matamatapolitik.com/trump-desak-militer-jepang-beli-senjata-dari-amerika-dan-aktif-lawan-korea-utara/>

<https://intpolicydigest.org/2018/03/04/east-asia-losing-faith-u-s-not-bad-thing/> diakses pada 20 Desember 2018

<https://www.brookings.edu/opinions/u-s-alliances-in-east-asia-internal-challenges-and-external-threats/>, diakses pada 20 Desember 2018

<https://www.businessinsider.com/where-in-the-world-us-influence-has-plummeted-because-of-trump-2017-11/?IR=T/#the-south-china-sea-1> diakses pada 20 Desember 2018

<http://www.europeanfinancialreview.com/?p=2743>, diakses pada 9 Oktober 2016

<https://www.washingtontimes.com/news/2016/jun/28/donald-trump-vows-to-cancel-trans-pacific-partners/>, diakses pada 20 Desember 2018